



Wacana Sekber

Malioboro Tak Efektif

■ Dewan Sebut Penguatan UPT Malioboro Lebih Diperlukan

YOGYA, TRIBUN - Kalangan legislatif menilai pembentukan sekretariat bersama (Sekber) Malioboro yang digulirkan Pemerintah Provinsi DIY, kurang efektif. Seharusnya, penguatan peran unit pelaksana teknis (UPT) akan menjadi penting dalam mengawasi kondisi Malioboro.

Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Nasrul Khoiri menjelaskan, penguatan peran UPT Malioboro justru diperlukan dibanding pembentukan Sekber Malioboro. Menurut politisi PKS ini, jika peran UPT dikuatkan, maka akan jauh lebih bagus untuk pengawasan Malioboro ke depannya.

"Kalau memang provinsi akan membentuk UPT khusus yang menangani kawasan sumbu filosofis, mungkin jauh lebih baik daripada Sekber," jelasnya, Senin (21/8).

Menurutnya, adanya penguatan peran UPT Malioboro akan meningkatkan kapasitas instansi tersebut, sehingga mampu memiliki lebih banyak wewenang dalam menangani kawasan Malioboro. Selama ini, peran UPT Malioboro hanya sebatas pada pemeliharaan saja.

"Sehingga, kewenangan yang dimiliki tersebut belum mampu menyelesaikan beragam permasalahan yang dihadapi kawasan utama tujuan wisata di Yogyakarta itu," ulasnya.

Dia mencontohkan, kewenangan

STORY HIGHLIGHT

- Kalangan legislatif menilai pembentukan sekretariat bersama (Sekber) Malioboro yang digulirkan Pemerintah Provinsi DIY, kurang efektif.
- Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Nasrul Khoiri menjelaskan, penguatan peran UPT Malioboro justru diperlukan dibanding pembentukan Sekber Malioboro.
- Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mengatakan, penguatan UPT Malioboro pun akan dilakukan dengan menaikkan eselon pejabatnya.

Sore yang sudah menjadi daerah kewenangan Pam Budaya.

"Ini yang harus dikomunikasikan, agar tak tumpang tindih," paparnya.

Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mengatakan, penguatan UPT Malioboro pun akan dilakukan dengan menaikkan eselon pejabatnya. Menurut Haryadi, jabatan kepala UPT pun harus dinaikkan, sehingga mampu melakukan koordinasi dengan instansi lebih tinggi.

Sejauh ini, Haryadi mengaku mengapresiasi kinerja UPT Malioboro untuk melakukan pengelolaan kawasan Malioboro. Hal ini lantaran UPT Malioboro sudah menunjukkan kinerja yang baik, meskipun mengalami keterbatasan peran dan fungsinya.

"Kami akan menguatkan peran UPT Malioboro dengan koordinasi lintas instansi. Itu yang akan kami tawarkan. Kalau Sekber kami belum tahu gambarnya akan seperti apa," paparnya.

Koordinasi UPT Malioboro ini, menurut Haryadi, akan dipadukan dengan beberapa instansi misalnya Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pariwisata serta Dinas Perhubungan. (ats)

| | | | |
|---------|----------------------------------|--|---|
| 1. | <input type="checkbox"/> Negatif | <input type="checkbox"/> Amat Segera | <input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi |
| 2. | <input type="checkbox"/> Positif | <input checked="" type="checkbox"/> Sangat | <input checked="" type="checkbox"/> Untuk Diketahui |

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|---------------------|--------------|--------|-----------------|
| 1. UPT. Malioboro | Netral | Segera | Untuk Diketahui |
| 2. Dinas Pariwisata | | | |

Yogyakarta, 02 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005